Katalog BPS : 1404070





BUKU 7

Specify Needs

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Modul Kesehatan dan Perumahan 2019

BADAN PUSAT STATISTIK





BUKU 7

Specify Needs

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Modul Kesehatan dan Perumahan 2019

BUKU 1 *SPECIFY NEEDS*
SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS)
MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN 2019

ISBN : -
No. Publikasi : 04230.1901
Katalog BPS : 1404070

Ukuran Buku : B5 JIS
Jumlah Halaman : vi+40 halaman

Penyunting :
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Gambar Kulit :
Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak Oleh :

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang penting di Indonesia. Data yang dihasilkan oleh survei ini telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, kesinambungan, ketersediaan, dan kualitas data Susenas harus terus dijaga dan ditingkatkan. Pada bulan September 2019, pengumpulan data Susenas dilakukan dengan menggunakan Kuesioner Modul Kesehatan dan Perumahan serta Konsumsi/Pengeluaran (Susenas MKP 2019).

Tahap pertama dari serangkaian kegiatan Susenas MKP 2019 adalah identifikasi kebutuhan pengguna (*specify needs*). Kegiatan *specify needs* dilaksanakan melalui kajian literatur, rapat internal BPS, rapat interkementerian, dan rapat bilateral dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L) guna memperoleh kesepakatan, sinkronisasi, dan sinergi indikator secara optimal.

Buku 1 *Specify Needs* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019 memuat informasi ukuran dan indikator yang dapat dihasilkan dari Susenas MKP 2019. Buku ini merupakan wujud pemenuhan kebutuhan indikator berbagai program yang diselenggarakan K/L dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Nawacita, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Buku ini menunjukkan bahwa hasil Susenas MKP 2019 berupa data dan indikator, benar-benar dinantikan dan dibutuhkan berbagai pihak.

Buku 1 *Specify Needs* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019 merupakan buku pertama dari empat rangkaian buku terkait kegiatan Susenas MKP 2019. Adapun buku lainnya adalah Buku 2 Manajemen Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019, Buku 3 Manajemen Lapangan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul kesehatan dan Perumahan 2019 serta Buku 4 Konsep dan Definisi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Kesehatan dan Perumahan 2019.

Selamat bekerja, semoga Tuhan yang Maha Kuasa berkenan memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Jakarta, Juni 2019
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suhariyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Urgensi Susenas MKP 2019 1
B. *Specify Needs* Susenas MKP 2019 2
C. Uji Coba Susenas MKP 2019 5
D. Cakupan Susenas MKP 2019 6
BAB II METODE PENGHITUNGAN INDIKATOR KESEHATAN SUSENAS MKP 2019 9
BAB III METODE PENGHITUNGAN INDIKATOR PERUMAHAN SUSENAS MKP 2019 21
BAB IV METODE PENGHITUNGAN INDIKATOR PERLINDUNGAN SOSIAL SUSENAS MKP 2019 29
DAFTAR PUSTAKA 39

BAB I
PENDAHULUAN

A. Urgensi Susenas MKP 2019

Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan 2019 (Susenas MKP 2019) merupakan solusi dalam melengkapi kebutuhan data dan informasi terkait kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial yang belum dapat diakomodir melalui Susenas Maret. Susenas MKP 2019 merupakan sarana untuk memperkaya ketersediaan berbagai indikator di bidang kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Selain itu, Susenas MKP 2019 juga dapat mengakomodir tambahan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan konsep global yang belum termuat dalam Susenas Maret 2019.

Susenas MKP 2019 dapat digunakan sebagai panduan untuk melihat capaian RPJMN 2015-2019. Selanjutnya, Susenas MKP 2019 mampu menjawab kebutuhan berbagai K/L sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi program RPJMN 2020-2024, Nawacita, dan TPB. Muatan pertanyaan yang cukup besar dalam Susenas Maret juga kurang memungkinkan untuk menggali lebih dalam informasi terkait kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, Susenas MKP 2019 sangat diperlukan untuk mengungkapkan berbagai alasan dari temuan indikator penting yang telah ada pada Susenas Maret 2019.

Susenas MKP 2019 mampu menghasilkan indikator yang tercantum dalam Nawacita terutama Nawacita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Selain itu, data dan indikator penting yang dihasilkan melalui Susenas MKP 2019 mampu menjawab berbagai indikator dalam TPB yaitu pada Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), dan Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), baik pada indikator global maupun proksi. Pemantauan indikator TPB penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan telah memberi manfaat untuk semua serta melibatkan semua kepentingan (*no one left behind*) dalam proses pembangunan.

Susenas MKP 2019 telah ditunggu kehadirannya oleh berbagai pihak. Berbagai indikator dasar yang juga merupakan kebutuhan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan nasional masih banyak yang tidak tertampung dalam Susenas Maret maupun survei lainnya. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya kementerian/lembaga (K/L)

nasional maupun internasional dalam berkoordinasi pada tahap penentuan kebutuhan (*specify needs*) Susenas MKP 2019.

B. *Specify Needs* Susenas MKP 2019

Susenas MKP 2019 perlu mendapat jaminan bahwa statistik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Hal itu dapat diwujudkan apabila proses bisnis yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dilaksanakan secara konsisten. Tahapan proses bisnis dalam kegiatan statistik selengkapnya adalah penentuan kebutuhan (*specify needs*), perancangan (*design*), pembangunan (*build*), pengumpulan (*collect*), pengolahan (*process*), analisis (*analyze*), diseminasi (*disseminate*), dan evaluasi (*evaluate*).

Tahapan pertama dalam proses bisnis kegiataan statistik adalah *specify needs* yang bertujuan memastikan agar data dan indikator yang dihasilkan melalui Susenas MKP 2019 benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna data yaitu data yang tepat sasaran untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Serangkaian penyelenggaraan kegiatan *specify needs* Susenas MKP 2019 dilaksanakan melalui kajian literatur, rapat internal BPS, rapat interkementerian dan rapat bilateral dengan berbagai K/L. Berikut adalah rincian kegiatan *specify needs* yang dilakukan:

(1) Kajian Literatur

Penyusunan Susenas MKP 2019 mengacu kepada dasar hukum atau legal dokumen yang melandasi indikator di bidang kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Landasan utama kajian literatur berasal dari Rancangan RPJMN 2020-2024, Nawacita, dan TPB.

- Dasar hukum yang menjadi acuan penyusunan indikator kesehatan antara lain:
  1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
  2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
  3) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 97 Nomor 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi serta Kesehatan Seksual.
  4) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Nomor 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak.

5) Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

- Landasan penentuan kebutuhan indikator perumahan antara lain:
  1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
  2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
  3) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 829 Tahun 1999 Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan.
  4) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
  5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.
  6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
  7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- Dasar hukum yang melandasi kebutuhan indikator perlindungan sosial adalah:
  1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
  3) Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

(2) Rapat Internal BPS

Perencanaan Susenas MKP 2019 memperhatikan kebutuhan data terkait kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Analisis kebutuhan data tersebut dibangun melalui diskusi antara Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dengan direktorat-direktorat terkait yaitu Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat Ketahanan Sosial, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, serta Direktorat Neraca Pengeluaran. Dari diskusi-diskusi tersebut diperoleh berbagai masukan dari sisi struktur pertanyaan dalam kuesioner maupun konsep dan definisi untuk Susenas MKP 2019.

(3) Rapat Interkementerian

Kegiatan ini memiliki tujuan sebagai media penyampaian informasi pelaksanaan Susenas MKP 2019 kepada K/L pengampu bidang kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Pada rapat interkementerian dipaparkan *draft* awal kuesioner yang telah disiapkan oleh Subdit Statistik Kesehatan dan Perumahan sebagai *subject matter* dari Susenas MKP 2019. Selanjutnya para *stakeholders* diberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi dan memberikan masukan terkait pertanyaan yang ada pada Susenas MKP 2019 sesuai dengan program kerja masing-masing. Sejumlah K/L yang hadir pada rapat interkementerian adalah Sekretariat SDGs Bappenas, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Pemukiman Bapppenas, Balitbangkes Kementerian Kesehatan, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Hasil dari rapat interkementerian yaitu masukan dan konfirmasi terkait pertanyaan yang dicakup dalam Susenas MKP 2019. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pertanyaan dalam Susenas MKP 2019 memang dibutuhkan oleh K/L terkait. Selanjutnya masukan dan konfirmasi dari K/L dilakukan melalui pembahasan dan diskusi yang lebih spesifik pada K/L terkait melalui rapat bilateral.

(4) Rapat Bilateral

Sebagai tindak lanjut dari diskusi dalam rapat interkementerian dilakukan juga rapat-rapat bilateral dengan K/L. Rapat-rapat bilateral tersebut diselenggarakan atas undangan dari K/L terkait. Hal ini menunjukkan keseriusan K/L untuk berperan serta dalam perencanaan Susenas MKP 2019. Rapat-rapat bilateral Susenas MKP 2019 diselenggarakan antara Sub Direktorat Statistik Kesehatan dan Perumahan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS dengan BPJS Ketenagakerjaan, P2JK Kementerian Kesehatan, TNP2K, Kementerian PUPR, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, dan UNICEF. Dari rapat-rapat bilateral tersebut diperoleh masukan pertanyaan untuk kuesioner Susenas MKP 2019 dan konsep definisi dari variabel-variabel yang dikumpulkan. Dengan adanya rapat-rapat bilateral tersebut, Susenas MKP 2019 diharapkan sejalan dengan arah perencanaan pembangunan dan mampu menjawab kebutuhan data para pihak.

C. Uji Coba Susenas MKP 2019

Secara umum, sasaran dilaksanakannya uji coba Susenas MKP 2019 adalah melakukan uji instrumen Susenas MKP 2019 secara kognitif dan *usability*. Uji secara kognitif dimaksudkan untuk mengetahui apakah responden dapat dengan mudah mengetahui dan memahami pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dalam Susenas MKP 2019. Sementara itu uji *usability* dimaksudkan agar mendapatkan informasi penerapan kuesioner Susenas MKP 2019 terhadap calon responden. Untuk memastikan pertanyaan dalam kuesioner mampu menjawab berbagai indikator yang dibutuhkan perlu dilakukan uji coba kuesioner. Secara khusus, uji coba Susenas MKP 2019 memiliki tujuan antara lain:

1. Mengujicobakan pertanyaan kuesioner Susenas MKP 2019 ke responden.
2. Perbaikan *draft* kuesioner serta konsep dan definisi Susenas MKP 2019 yang telah disusun.

Uji coba kuesioner MKP 2019 dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada saat *workshop* Penyusunan Instrumen Susenas MKP 2019 dan uji coba lapangan. *Workshop* Penyusunan Instrumen Susenas MKP 2019 dilaksanakan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat pada bulan April 2019 dengan didukung oleh TNP2K. *Draft* kuesioner Susenas MKP 2019 yang dihasilkan melalui *workshop* diujicobakan terhadap 2 (dua) orang responden yang dihadirkan ke lokasi *workshop*. Uji coba difokuskan untuk mengetahui seberapa jauh *draft* pertanyaan dapat dimengerti dan dipahami oleh responden.

Uji coba kedua dilaksanakan secara langsung ke lapangan di 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sumatera Selatan dengan responden sebanyak 16 rumah tangga. Responden rumah tangga dalam uji coba Kuesioner MKP 2019 merupakan rumah tangga yang tinggal di Rusun bantuan Kementerian PUPR serta rumah tangga penerima bantuan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PUPR. Kegiatan uji coba lapangan Susenas MKP 2019 mendapat dukungan dari Kementerian PUPR.

Melalui uji coba Susenas MKP 2019 diperoleh masukan dan temuan dari rumah tangga sampel terkait pertanyaan kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Output yang dihasilkan melalui uji coba Susenas MKP 2019 yaitu perbaikan pertanyaan dan konsep definisi yang digunakan dalam pelaksanaan Susenas MKP 2019.

D. Cakupan Susenas MKP 2019

Secara garis besar, cakupan Susenas MKP 2019 meliputi 3 (tiga) kelompok besar yaitu bidang kesehatan, bidang perumahan, dan bidang perlindungan sosial. Cakupan Susenas MKP 2019 menghasilkan berbagai informasi yang memberikan kontribusi pada setiap tahapan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian TPB, RPJMN, dan Nawacita.

(1) Bidang Kesehatan

Susenas MKP 2019 pada bidang kesehatan terdiri dari 8 (delapan) blok pertanyaan yaitu: 1) Keterangan Rawat Jalan, 2) Keterangan Rawat Inap, 3) Keterangan Biaya Alat Kesehatan, Test Kesehatan, Pemeliharaan Kesehatan, dan *Ambulance* yang Dibayar Sendiri, 4) Posyandu dan Status Kehamilan, 5) Kehamilan, 6) Proses Melahirkan, 7) Keluarga Berencana, 8) Keterangan Imunisasi, ASI, dan Makanan Pendamping ASI. Melalui 8 (delapan) blok pertanyaan tersebut dihasilkan berbagai indikator terkait kesehatan ibu, kesehatan anak, dan pengeluaran untuk kesehatan yang dibayar sendiri atau *Out of Pocket* (OOP). Fokus Susenas MKP 2019 pada bidang kesehatan disesuaikan dengan tujuan pembangunan kesehatan yaitu untuk mewujudkan peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan *stunting*, serta penurunan prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular.

Informasi mengenai kesehatan ibu dan anak dalam Susenas MKP 2019 dikumpulkan secara lebih komprehensif dengan menggali informasi mengenai kesehatan ibu sejak saat hamil, melahirkan, hingga pasca melahirkan/masa nifas. Informasi tersebut diperoleh dari para ibu yang melahirkan anak lahir hidup maupun anak lahir mati. Hal tersebut sejalan dengan fokus pembangunan kesehatan yaitu peningkatan kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu menjadi prioritas karena angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi meskipun pemerintah terus memperluas cakupan layanan kesehatan masyarakat.

Permasalahan kesehatan anak yang tak kalah penting dan menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah *stunting*. *Stunting* dipengaruhi oleh berbagai faktor, bukan hanya dari asupan gizi yang diberikan, namun juga dari aspek kesehatan dan lingkungan. Melalui Susenas MKP 2019 dapat disajikan berbagai informasi pendukung percepatan penanganan *stunting*, diantaranya informasi mengenai alasan anak tidak diberikan imunisasi serta frekuensi dan keragaman asupan nutrisi. Susenas MKP 2019 juga menangkap pendayagunaan unit kesehatan berbasis masyarakat sebagai

salah satu sarana percepatan pengentasan *stunting* yaitu Posyandu untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Upaya penurunan prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular terkait dengan jaminan kesehatan dan beban biaya kesehatan yang masih harus ditanggung oleh masyarakat. Susenas MKP 2019 berupaya mengumpulkan informasi pemanfaatan jaminan kesehatan dan struktur biaya kesehatan dari setiap individu pada setiap fasilitas kesehatan baik untuk mengobati sendiri, rawat jalan, rawat inap, dan pendukung kesehatan lainnya yaitu pembelian alat-alat kesehatan, biaya tes kesehatan, pemeliharaan kesehatan, dan penggunaan *ambulance* untuk kondisi gawat darurat ke fasilitas kesehatan.

(2) Bidang Perumahan

Cakupan Susenas MKP 2019 di bidang perumahan meliputi 4 (empat) blok antara lain 1) Penguasaan tempat tinggal, 2) Kondisi dan Fasilitas Bangunan, 3) Pemanfaatan Energi serta 4) Kondisi Lingkungan. Cakupan tersebut mengakomodir kebutuhan indikator akses universal air minum dan sanitasi serta penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, layak, dan terjangkau. Penjabaran dari kedua kelompok tersebut antara lain melalui program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP). Di samping itu, dijabarkan pula pada Susenas MKP 2019 kondisi rumah layak huni yang memenuhi syarat kesehatan sebagai perluasan dari indikator-indikator rumah layak huni yang dihasilkan dari Susenas Maret.

Kelayakhunian rumah yang memenuhi syarat kesehatan merupakan indikator yang komprehensif yang memperhatikan berbagai kondisi. Kondisi tersebut antara lain mengenai kecukupan luas hunian, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, jenis lantai terluas. Selanjutnya syarat kesehatan memperhatikan keberadaan jendela, ventilasi, pencahayaan, jenis bahan bakar memasak, keberadaan asap rokok dalam rumah, air minum layak, sanitasi layak. Perilaku hidup bersih dan sehat digambarkan dari keberadaan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun, serta kondisi kesehatan lingkungan tempat tinggal.

Pembangunan bidang perumahan menjadi bagian dari kerangka intervensi upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan prevalensi *stunting* di Indonesia. Kerangka ini termasuk sebagai kerangka intervensi

sensitif yang bersifat makro serta berkontribusi pada 70 persen intervensi *stunting*. Kondisi rumah layak huni yang memenuhi syarat kesehatan dengan diiringi perilaku hidup bersih dari masyarakat tentu merupakan salah satu unsur percepatan penurunan prevalensi *stunting* di Indonesia.

(3) Bidang Perlindungan Sosial

Bidang perlindungan sosial mencakup 2 (dua) blok yaitu Akses terhadap Kredit Usaha Rumah Tangga dan Keterangan Perlindungan Sosial. Sementara itu kelompok indikator di bidang perlindungan sosial yang dicakup dalam Susenas MKP 2019 meliputi 3 (tiga) kelompok antara lain, kredit usaha rumah tangga, program perlindungan sosial oleh pemerintah pusat, serta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Pada kelompok kredit usaha rumah tangga dijabarkan tentang akses anggota rumah tangga terhadap kredit usaha yang dapat disajikan berdasarkan disagregasi karakteristik individu penerima kredit usaha rumah tangga. Lebih lanjut disajikan pula informasi terkait perilaku rumah tangga dalam pemanfaatan kredit usaha dan pengalaman penolakan pengajuan kredit usaha.

Susenas MKP 2019 juga dapat menyajikan informasi bagi monitoring pelaksanaan berbagai program bantuan sosial sesuai dengan tahapan perluasan cakupan penerima manfaat periode Mei-Agustus 2019. Informasi lain yang dapat dianalisis lebih dalam guna optimalisasi manfaat program bantuan sosial adalah pengalaman berbagai kendala dan hambatan oleh penerima manfaat bantuan sosial.

Kelompok jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan pada Susenas MKP 2019 menyajikan informasi lebih dalam terkait pemanfaatannya di masyarakat. Indikator terkait jaminan sosial ketenagakerjaan adalah hal baru yang disajikan melalui Susenas MKP 2019, meliputi kepesertaan dan kesediaan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan biaya sendiri.

BAB II
METODE PENGHITUNGAN INDIKATOR KESEHATAN SUSENAS MKP 2019

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap program pembangunan pemerintah di bidang kesehatan dilakukan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Berbagai kebijakan dan program pembangunan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah tak lepas dari kebutuhan data dan indikator pada setiap tahap perencanaan, monitoring dan evaluasinya. Susenas MKP 2019 menyajikan berbagai data dan indikator terkait kesehatan khususnya guna menunjang kebutuhan data RPJMN, Nawacita, dan TPB.

Penghitungan indikator kesehatan dalam Susenas MKP 2019 terbagi atas 8 (delapan) blok yang menghasilkan berbagai indikator terkait kesehatan ibu, kesehatan anak, dan pengeluaran untuk kesehatan yang dibayar sendiri atau *Out of Pocket* (OOP). Metode penghitungan indikator kesehatan selanjutnya dijelaskan pada bab ini.

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
1. Keterangan Rawat Jalan	
a. Rata-rata biaya per kapita sebulan untuk mengobati sendiri dengan obat modern yang dibayar sendiri oleh penduduk dengan keluhan kesehatan (Rupiah)	Total biaya sebulan untuk mengobati sendiri dengan obat modern yang dibayar sendiri oleh penduduk dengan keluhan kesehatan (Rupiah) / Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan mengobati sendiri dengan obat modern
b. Rata-rata biaya per kapita sebulan untuk rawat jalan di fasilitas kesehatan modern yang dibayar sendiri oleh penduduk dengan keluhan kesehatan (Rupiah)	Total biaya sebulan untuk rawat jalan di fasilitas kesehatan modern yang dibayar sendiri oleh penduduk dengan keluhan kesehatan (Rupiah) / Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat jalan di fasilitas kesehatan modern
c. Rata-rata biaya obat per kapita sebulan untuk rawat jalan di fasilitas kesehatan modern yang dibayar sendiri oleh penduduk dengan keluhan kesehatan (Rupiah)	Total biaya obat sebulan untuk rawat jalan di fasilitas kesehatan modern yang dibayar sendiri oleh penduduk dengan keluhan kesehatan (Rupiah) / Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan rawat jalan di fasilitas kesehatan modern

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
2. Keterangan Rawat Inap	
a. Rata-rata biaya per kapita setahun untuk rawat inap di fasilitas kesehatan modern yang dibayar sendiri oleh penduduk (Rupiah)	Total biaya setahun untuk rawat inap di fasilitas kesehatan modern yang dibayar sendiri oleh penduduk (Rupiah) / Jumlah penduduk yang rawat inap di fasilitas kesehatan modern
b. Rata-rata biaya obat per kapita setahun untuk rawat inap di fasilitas kesehatan modern yang dibayar sendiri oleh penduduk (Rupiah)	Total biaya obat setahun untuk rawat inap di fasilitas kesehatan modern yang dibayar sendiri oleh penduduk (Rupiah) / Jumlah penduduk yang rawat inap di fasilitas kesehatan modern
3. Keterangan Biaya Alat Kesehatan,Tes Kesehatan, Pemeliharaan Kesehatan, dan *Ambulance* yang Dibayar Sendiri	
a. Rata-rata biaya per kapita setahun untuk pembelian alat kesehatan yang dibayar sendiri oleh penduduk (Rupiah)	Total biaya setahun untuk pembelian alat kesehatan yang dibayar sendiri oleh penduduk (Rupiah) / Jumlah penduduk yang membeli alat kesehatan
b. Rata-rata biaya per kapita setahun untuk tes kesehatan yang dibayar sendiri oleh penduduk (Rupiah)	Total biaya setahun untuk tes kesehatan yang dibayar sendiri oleh penduduk (Rupiah) / Jumlah penduduk yang melakukan tes kesehatan

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
c. Rata-rata biaya per kapita setahun untuk pemeliharaan kesehatan yang dibayar sendiri oleh penduduk (Rupiah)	Total biaya setahun untuk pemeliharaan kesehatan yang dibayar sendiri oleh penduduk (Rupiah) / Jumlah penduduk yang melakukan pemeliharaan kesehatan
d. Rata-rata biaya per kapita setahun untuk penggunaan *ambulance* yang dibayar sendiri (Rupiah)	Total biaya setahun untuk penggunaan *ambulance* yang dibayar sendiri oleh penduduk (Rupiah) / Jumlah penduduk yang menggunakan *ambulance*
4. Posyandu dan Status Kehamilan	
a. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir	Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir / Jumlah WPK usia 10-54 tahun X 100
b. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang sedang hamil dan pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir	Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang sedang hamil dan pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir / Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang sedang hamil X 100
c. Persentase penduduk usia 0-4 tahun yang pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir	Jumlah penduduk usia 0-4 tahun yang pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir / Jumlah penduduk usia 0-4 tahun X 100

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
d. Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas yang pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas}} \times 100$
e. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir menurut jenis pelayanan yang didapat di posyandu	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir menurut jenis pelayanan yang didapat di posyandu}}{\text{Jumlah penduduk usia 10-54 tahun yang pernah ke posyandu}} \times 100$
f. Persentase penduduk usia 0-4 tahun yang pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir menurut jenis pelayanan yang didapat di posyandu	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-4 tahun yang pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir menurut jenis pelayanan yang didapat di posyandu}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-4 tahun yang pernah ke posyandu}} \times 100$
g. Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir menurut jenis pelayanan yang didapat di posyandu	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas yang pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir menurut jenis pelayanan yang didapat di posyandu}}{\text{Jumlah penduduk usia 60 tahun yang pernah ke posyandu}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
h. Persentase WPK usia 10-54 tahun, penduduk usia 0-4 tahun, dan 60 tahun ke atas yang tidak pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir menurut alasan tidak pernah ke posyandu	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun, penduduk usia 0-4 tahun, dan 60 tahun ke atas yang tidak pernah ke posyandu dalam enam bulan terakhir menurut alasan tidak pernah ke posyandu}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun, penduduk usia 0-4 tahun, dan 60 tahun ke atas yang tidak pernah ke posyandu}}$ X 100
5. Kehamilan	
a. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang memeriksakan kandungan pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang memeriksakan kandungan pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melahirkan dalam 2 (dua) tahun terakhir}}$ X 100
b. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang memeriksakan kandungan pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir menurut fasilitas kesehatan	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang memeriksakan kandungan pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir menurut fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang memeriksakan kandungan pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir}}$ X 100
c. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang memeriksakan kandungan pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir menurut tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang memeriksakan kandungan pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir menurut tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang memeriksakan kandungan pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir}}$ X 100

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
d. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang mendapatkan pelayanan ANC (*Antenatal Care*) pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir	Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang mendapatkan pelayanan ANC (*Antenatal Care*) pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir / Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang memeriksakan kandungan pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir X 100
e. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang memeriksakan kandungan pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir berdasarkan tindakan yang dilakukan (10 T)	Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang memeriksakan kandungan pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir berdasarkan tindakan yang dilakukan (10 T) / Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang memeriksakan kandungan pada kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir X 100
f. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang mengkonsumsi pil zat besi atau pil penambah darah minimal 90 butir selama kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir	Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang mengkonsumsi pil zat besi atau pil penambah darah minimal 90 butir selama kehamilan baduta yang dilahirkan terakhir / Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir X 100
6. Proses Melahirkan	
a. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang penolong persalinan pertamanya adalah tenaga kesehatan ketika melahirkan baduta yang terakhir	Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang penolong persalinan pertamanya adalah tenaga kesehatan ketika melahirkan baduta yang terakhir / Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir X 100

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
b. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang penolong persalinan terakhirnya adalah tenaga kesehatan ketika melahirkan baduta yang terakhir	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang penolong persalinan terakhirnya adalah tenaga kesehatan ketika melahirkan baduta yang terakhir}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir}} \times 100$
c. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang persalinannya di fasilitas kesehatan ketika melahirkan baduta yang terakhir	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang persalinannya di fasilitas kesehatan ketika melahirkan baduta yang terakhir}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir}} \times 100$
d. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang mendapatkan pelayanan kontak nifas ketika melahirkan baduta yang terakhir	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang mendapatkan pelayanan kontak nifas ketika melahirkan baduta yang terakhir}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir}} \times 100$
e. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang mendapatkan pelayanan kontak nifas oleh tenaga kesehatan ketika melahirkan baduta yang terakhir	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang mendapatkan pelayanan kontak nifas oleh tenaga kesehatan ketika melahirkan baduta yang terakhir}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
f. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang mendapatkan pelayanan kontak nifas di fasilitas kesehatan ketika melahirkan baduta yang terakhir	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang mendapatkan pelayanan kontak nifas di fasilitas kesehatan ketika melahirkan baduta yang terakhir}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir}} \times 100$
g. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang baduta lahir hidup terakhirnya mendapatkan pelayanan neonatal	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang baduta lahir hidup terakhirnya mendapatkan pelayanan neonatal}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir}} \times 100$
h. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang baduta lahir hidup terakhirnya mendapatkan pelayanan neonatal oleh tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang baduta lahir hidup terakhirnya mendapatkan pelayanan neonatal oleh tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir}} \times 100$
i. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang baduta lahir hidup terakhirnya mendapatkan pelayanan neonatal di fasilitas kesehatan	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang baduta lahir hidup terakhirnya mendapatkan pelayanan neonatal di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
7. Keluarga Berencana	
a. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang pernah melakukan konsultasi tentang alat/cara KB di fasilitas kesehatan	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melakukan konsultasi tentang alat/cara KB di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun}} \times 100$
b. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang mendapat informasi efek samping atau masalah kesehatan yang mungkin timbul jika menggunakan alat/cara KB	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang mendapat informasi efek samping atau masalah kesehatan yang mungkin timbul jika menggunakan alat/cara KB}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melakukan konsultasi tentang alat/cara KB di fasilitas kesehatan}} \times 100$
c. Persentase WPK usia 10-54 tahun yang mendapatkan informasi mengenai alternatif alat/cara KB	$\frac{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang mendapatkan informasi mengenai alternatif alat/cara KB}}{\text{Jumlah WPK usia 10-54 tahun yang pernah melakukan konsultasi tentang alat/cara KB di fasilitas kesehatan}} \times 100$
8. Keterangan Imunisasi, ASI, dan Makanan Pendamping ASI	
a. Persentase baduta yang pernah diberi imunisasi menurut fasilitas kesehatan	$\frac{\text{Jumlah baduta yang pernah diberi imunisasi menurut fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah baduta yang pernah diberi imunisasi}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
b. Persentase baduta yang pernah diberi imunisasi menurut tenaga kesehatan yang memberikan imunisasi	$\frac{\text{Jumlah baduta yang pernah diberi imunisasi menurut tenaga kesehatan yang memberikan imunisasi}}{\text{Jumlah baduta yang pernah diberi imunisasi}} \times 100$
c. Persentase baduta yang tidak pernah diberi imunisasi menurut alasan tidak pernah diberi imunisasi	$\frac{\text{Jumlah baduta yang tidak pernah diberi imunisasi menurut alasan tidak pernah diberi imunisasi}}{\text{Jumlah baduta yang tidak pernah diberi imunisasi}} \times 100$
d. Persentase anak umur 6-23 bulan yang menerima vitamin A dalam 6 bulan terakhir	$\frac{\text{Jumlah anak umur 6-23 bulan yang menerima vitamin A dalam 6 bulan terakhir}}{\text{Jumlah anak umur 6-23 bulan}} \times 100$
e. Persentase bayi umur 6-8 bulan yang menerima makanan padat, setengah padat, atau lumat selama seharian kemarin	$\frac{\text{Jumlah bayi umur 6-8 bulan yang menerima makanan padat, setengah padat, atau lumat selama seharian kemarin}}{\text{Jumlah bayi umur 6-8 bulan}} \times 100$
f. Persentase bayi umur 6-8 bulan yang masih diberi ASI yang menerima makanan padat, setengah padat, atau lumat selama seharian kemarin	$\frac{\text{Jumlah bayi umur 6-8 bulan yang masih diberi ASI yang menerima makanan padat, setengah padat, atau lumat selama seharian kemarin}}{\text{Jumlah bayi umur 6-8 bulan}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
g. Persentase anak umur 9-23 bulan yang masih diberi ASI yang menerima makanan padat, setengah padat atau lumat selama seharian kemarin	$\frac{\text{Jumlah anak umur 9-23 bulan yang masih diberi ASI yang menerima makanan padat, setengah padat atau lumat selama seharian kemarin}}{\text{Jumlah anak umur 9-23 bulan}} \times 100$
h. Persentase anak umur 6-23 bulan yang sudah tidak diberi ASI yang menerima makanan padat, setengah padat atau lumat selama seharian kemarin	$\frac{\text{Jumlah anak umur 6-23 bulan yang sudah tidak diberi ASI yang menerima makanan padat, setengah padat atau lumat selama seharian kemarin}}{\text{Jumlah anak umur 6-23 bulan}} \times 100$
i. Persentase anak umur 6-23 bulan yang masih diberi ASI yang menerima empat atau lebih jenis makanan selama seharian kemarin	$\frac{\text{Jumlah anak umur 6-23 bulan yang masih diberi ASI yang menerima empat atau lebih jenis makanan selama seharian kemarin}}{\text{Jumlah anak umur 6-23 bulan}} \times 100$
j. Persentase anak umur 6-23 bulan yang sudah tidak diberi ASI yang menerima 4 atau lebih jenis makanan selama seharian kemarin	$\frac{\text{Jumlah anak umur 6-23 bulan yang sudah tidak diberi ASI yang menerima 4 atau lebih jenis makanan selama seharian kemarin}}{\text{Jumlah anak umur 6-23 bulan}} \times 100$

BAB III
METODE PENGHITUNGAN INDIKATOR PERUMAHAN SUSENAS MKP 2019

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Rumah juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Unsur dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Dalam program-program pembangunan, pemerintah berupaya mewujudkan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Guna melakukan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tersebut diperlukan data akurat mencakup berbagai indikator perumahan. Susenas MKP 2019 mampu menjadi salah satu solusi penyediaan data dan indikator perumahan yang meliputi penguasaan tempat tinggal, kondisi dan fasilitas bangunan, pemanfaatan energi dan kondisi lingkungan. Metode penghitungan indikator perumahan selanjutnya akan dikupas pada bab ini.

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
1. Penguasaan Tempat Tinggal	
a. Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal milik sendiri menurut cara memperoleh	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal milik sendiri menurut cara memperoleh}}{\text{Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal sendiri}} \times 100$
b. Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal milik sendiri yang dibeli dari pengembang atau bukan pengembang menurut jenis cara membeli	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal milik sendiri yang dibeli dari pengembang atau bukan pengembang menurut jenis cara membeli}}{\text{Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal milik sendiri yang dibeli pengembang atau bukan pengembang}} \times 100$
c. Persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal milik sendiri menurut jenis bukti kepemilikan tanah tempat tinggal	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal milik sendiri menurut jenis bukti kepemilikan tanah tempat tinggal}}{\text{Jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal milik sendiri}} \times 100$
d. Persentase rumah tangga menurut kepemilikan rumah selain yang ditempati saat ini	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga menurut kepemilikan rumah selain yang ditempati saat ini}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
e. Persentase rumah tangga yang memiliki rumah lain selain yang ditempati saat ini menurut penggunaannya	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah lain selain yang ditempati saat ini menurut penggunaannya}}{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah lain selain yang ditempati saat ini}} \times 100$
2. Kondisi dan Fasilitas Bangunan	
a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
b. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan lokasi sumber berada di dalam/ di halaman rumah (*on-premises*)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan lokasi sumber berada di dalam/ di halaman rumah (*on-premises*)}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
c. Persentase rumah tangga yang sumber air minum utamanya adalah permukaan air	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang sumber air minum utamanya adalah permukaan air}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum tidak layak	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum tidak layak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak terbatas	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak terbatas}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
f. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dasar	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dasar}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
g. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak bersama	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak bersama}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
h. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dasar	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dasar}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
i. Persentase rumah tangga dengan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS)}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
j. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
k. Indeks rumah sehat, yang dilihat dari: kecukupan luas hunian, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, jenis lantai terluas, keberadaan jendela, ventilasi, pencahayaan, jenis bahan bakar memasak, keberadaan asap rokok dalam rumah, air minum layak, sanitasi layak, dan fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	Rumah dikatakan sehat, jika: a) Kecukupan luas hunian ≥ 7,2 m2 b) Jenis atap terluas berupa beton, genteng, asbes, seng, bambu, kayu/sirap c) Jenis dinding terluas berupa tembok d) Jenis lantai terluas berupa marmer/granit, keramik, parket, ubin/tegel, kayu/papan, semen/bata merah, bambu e) Terdapat jendela, ventilasi dan pencahayaan minimal pada 1 ruangan f) Jenis bahan bakar memasak listrik, elpiji, dan gas g) Tidak ada asap rokok dalam rumah h) Memiliki akses terhadap sumber air minum layak i) Memiliki akses terhadap sanitasi layak j) Terdapat fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun
3. Pemanfaatan Energi	
a. Persentase rumah tangga yang menggunakan kayu bakar atau arang sebagai bahan bakar utama dalam setahun terakhir	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menggunakan kayu bakar atau arang sebagai bahan bakar utama dalam setahun terakhir}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
b. Persentase rumah tangga yang menggunakan kayu bakar atau arang sebagai bahan bakar utama dalam setahun terakhir menurut lama pemakaian	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menggunakan kayu bakar atau arang sebagai bahan bakar utama dalam setahun terakhir menurut lama pemakaian}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
4. Kondisi Lingkungan	
a. Persentase rumah tangga menurut letak/lokasi rumah	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga menurut letak/lokasi rumah}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
b. Persentase rumah tangga menurut lebar jalan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga menurut lebar jalan}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
c. Persentase rumah tangga yang mengalami kejadian bencana dalam setahun terakhir	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mengalami kejadian bencana dalam setahun terakhir}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
d. Persentase rumah tangga yang memiliki ruang terbuka hijau	$\frac{\text{Jumlah rumah rumah tangga yang memiliki ruang terbuka hijau}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
e. Persentase rumah tangga yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut jenis yang digunakan dalam sebulan terakhir	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut jenis yang digunakan dalam sebulan terakhir}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
f. Persentase rumah tangga yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut cara pembuangan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut cara pembuangan}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
g. Persentase rumah tangga menurut pengetahuan mengenai pemisahan sampah organik dan anorganik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga menurut pengetahuan mengenai pemisahan sampah organik dan anorganik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
h. Persentase rumah tangga menurut perlakuan pemisahan sampah organik dan sampah anorganik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga menurut perlakuan pemisahan sampah organik dan sampah anorganik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
i. Persentase rumah tangga menurut kepemilikan tempat sampah tertutup	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga menurut kepemilikan tempat sampah tertutup}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
j. Persentase rumah tangga menurut perlakuan penanganan sampah	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga menurut kepemilikan tempat sampah tertutup}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$

BAB IV
METODE PENGHITUNGAN INDIKATOR PERLINDUNGAN SOSIAL SUSENAS MKP 2019

Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu cita-cita Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini telah diupayakan oleh pemerintah melalui pembangunan di berbagai bidang yang menyentuh seluruh lapisan Rakyat Indonesia. Beriringan dengan laju pembangunan nasional, diperlukan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Guna mewujudkan perlindungan sosial, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Untuk menjamin terlaksananya Sistem Jaminan Sosial Nasional diperlukan data pada seluruh tahapan perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai kebijakan perlindungan sosial.

Susenas MKP 2019 merupakan salah satu sarana yang dapat mewujudkan kebutuhan data terkait perlindungan sosial. Hasil Susenas MKP 2019 dapat digunakan untuk membangun indikator terkait perlindungan sosial, antara lain kredit usaha rumah tangga dan program perlindungan sosial oleh pemerintah pusat. Selanjutnya bab ini memaparkan mengenai metode penghitungan indikator-indikator tersebut.

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
1. Akses Terhadap Kredit Usaha Rumah Tangga	
a. Persentase individu menurut status pengajuan kredit usaha rumah tangga	$\frac{\text{Jumlah individu menurut status pengajuan kredit usaha rumah tangga}}{\text{Jumlah individu}} \times 100$
b. Persentase individu yang menerima kredit usaha menurut jenis kredit usaha	$\frac{\text{Jumlah individu yang menerima kredit usaha menurut jenis kredit usaha}}{\text{Jumlah individu penerima kredit usaha}} \times 100$
c. Persentase rumah tangga berdasarkan pemanfaatan kredit usaha rumah tangga menurut jenis kredit usaha	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga berdasarkan pemanfaatan kredit usaha rumah tangga menurut jenis kredit usaha}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima kredit usaha rumah tangga menurut jenis kredit usaha}} \times 100$
2. Keterangan Perlindungan Sosial	
a. Persentase rumah tangga penerima manfaat program beras sejahtera menurut kepemilikan kartu keluarga sejahtera periode Mei-Agustus 2019	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat program beras sejahtera menurut kepemilikan kartu keluarga sejahtera periode Mei-Agustus 2019}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat program beras sejahtera periode Mei-Agustus 2019}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
b. Rata-rata kuantitas beras yang diterima per-bulan oleh rumah tangga penerima manfaat program beras sejahtera periode Mei-Agustus 2019	Jumlah kuantitas beras yang diterima per-bulan oleh rumah tangga penerima manfaat program beras sejahtera periode Mei-Agustus 2019 / Jumlah rumah tangga penerima manfaat program beras sejahtera periode Mei-Agustus 2019
c. Persentase rumah tangga penerima manfaat beras sejahtera menurut persepsi kualitas beras yang diterima periode Mei-Agustus 2019	Jumlah rumah tangga penerima manfaat beras sejahtera menurut persepsi kualitas beras yang diterima periode Mei-Agustus 2019 / Jumlah rumah tangga penerima manfaat program beras sejahtera periode Mei-Agustus 2019 X 100
d. Rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga penerima program beras sejahtera untuk mendapatkan beras sejahtera periode Mei-Agustus 2019	Jumlah biaya yang dikeluarkan rumah tangga penerima program beras sejahtera untuk mendapatkan beras sejahtera periode Mei-Agustus 2019 / Jumlah rumah tangga yang membayar untuk penerimaan beras sejahtera periode Mei-Agustus 2019
e. Persentase rumah tangga penerima program beras sejahtera menurut alasan mengeluarkan biaya untuk memperoleh beras sejahtera periode Mei-Agustus 2019	Jumlah rumah tangga penerima program beras sejahtera menurut alasan mengeluarkan biaya untuk memperoleh beras sejahtera periode Mei-Agustus 2019 / Jumlah rumah tangga penerima manfaat program beras sejahtera periode Mei-Agustus 2019 X 100

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
f. Persentase rumah tangga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut kepemilikan kartu keluarga sejahtera periode Mei-Agustus 2019	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut kepemilikan kartu keluarga sejahtera periode Mei-Agustus 2019}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat BPNT periode Mei-Agustus 2019}} \times 100$
g. Persentase rumah tangga penerima manfaat BPNT menurut pengetahuan terhadap nilai bantuan yang diterima periode Mei-Agustus 2019	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat BPNT menurut pengetahuan terhadap nilai bantuan yang diterima periode Mei-Agustus 2019}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat BPNT periode Mei-Agustus 2019}} \times 100$
h. Persentase rumah tangga penerima manfaat BPNT menurut komoditas yang dibeli periode Mei-Agustus 2019	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat BPNT menurut komoditas yang dibeli periode Mei-Agustus 2019}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat BPNT periode Mei-Agustus 2019}} \times 100$
i. Persentase rumah tangga penerima manfaat BPNT yang membeli beras menurut persepsi kualitas beras yang dibeli periode Mei-Agustus 2019	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat BPNT yang membeli beras menurut persepsi kualitas beras yang dibeli periode Mei-Agustus 2019}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat BPNT periode Mei-Agustus 2019}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
j. Persentase rumah tangga penerima manfaat BPNT menurut jenis tempat membeli bahan pangan menggunakan BPNT periode Mei-Agustus 2019	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat BPNT menurut jenis tempat membeli bahan pangan menggunakan BPNT periode Mei-Agustus 2019}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat BPNT periode Mei-Agustus 2019}} \times 100$
k. Persentase rumah tangga penerima manfaat BPNT menurut jarak tempat membeli bahan pangan menggunakan BPNT periode Mei-Agustus 2019	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat BPNT menurut jarak tempat membeli bahan pangan menggunakan BPNT periode Mei-Agustus 2019}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat BPNT periode Mei-Agustus 2019}} \times 100$
l. Persentase rumah tangga penerima manfaat BPNT menurut jenis kesulitan/ hambatan yang dialami untuk memanfaatkan BPNT periode Mei-Agustus 2019	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat BPNT menurut jenis kesulitan/ hambatan yang dialami untuk memanfaatkan BPNT periode Mei-Agustus 2019}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat BPNT periode Mei-Agustus 2019}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
m. Persentase rumah tangga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menurut kepemilikan kartu keluarga sejahtera dalam setahun terakhir	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menurut kepemilikan kartu keluarga sejahtera dalam setahun terakhir}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PKH dalam setahun terakhir}} \times 100$
n. Persentase rumah tangga penerima manfaat PKH menurut akses layanan manfaat PKH dalam setahun terakhir	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PKH menurut akses layanan manfaat PKH dalam setahun terakhir}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PKH dalam setahun terakhir}} \times 100$
o. Persentase rumah tangga penerima manfaat PKH menurut pengetahuan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh rumah tangga penerima manfaat	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PKH menurut pengetahuan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh rumah tangga penerima manfaat}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PKH dalam setahun terakhir}} \times 100$
p. Persentase rumah tangga penerima manfaat PKH menurut waktu terakhir kali menerima PKH dalam setahun terakhir	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PKH menurut waktu terakhir kali menerima PKH dalam setahun terakhir}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PKH dalam setahun terakhir}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
q. Persentase rumah tangga penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) menurut kepemilikan kartu keluarga sejahtera dalam setahun terakhir	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) menurut kepemilikan kartu keluarga sejahtera dalam setahun terakhir}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PIP dalam setahun terakhir}} \times 100$
r. Persentase rumah tangga penerima manfaat PIP menurut waktu terakhir kali menerima PIP dalam setahun terakhir	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PIP menurut waktu terakhir kali menerima PIP dalam setahun terakhir}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PIP dalam setahun terakhir}} \times 100$
s. Persentase rumah tangga penerima manfaat PIP menurut pihak yang mencairkan PIP dalam setahun terakhir	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PIP menurut pihak yang mencairkan PIP dalam setahun terakhir}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PIP dalam setahun terakhir}} \times 100$
t. Persentase rumah tangga penerima manfaat PIP menurut bentuk penerimaan PIP dalam setahun terakhir	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PIP menurut bentuk penerimaan PIP dalam setahun terakhir}}{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat PIP dalam setahun terakhir}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
u. Persentase rumah tangga penerima program perlindungan sosial lainnya dalam setahun terakhir	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima program perlindungan sosial lainnya dalam setahun terakhir}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
v. Persentase rumah tangga peserta jaminan sosial ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga peserta jaminan sosial ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
w. Persentase rumah tangga peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
x. Persentase rumah tangga penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah rumah tangga peserta jaminan sosial ketenagakerjaan}} \times 100$
y. Persentase rumah tangga penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan menurut persepsi kecukupan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterima	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan menurut persepsi kecukupan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterima}}{\text{Jumlah rumah tangga peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang menerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan}} \times 100$

Indikator	Metode Penghitungan
(1)	(2)
z. Persentase rumah tangga bukan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan menurut kesediaan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan biaya sendiri	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga bukan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan menurut kesediaan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan biaya sendiri}}{\text{Jumlah rumah tangga bukan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan}} \times 100$

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kesehatan.1999. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 829 Tahun 1999 Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

_____. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

_____. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Nomor 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

_____. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 97 Nomor 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi serta Kesehatan Seksual*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019-Buku II Agenda Pembangunan Bidang*. Jakarta: Bappenas.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: Bappenas.

_____. 2014. *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: Bappenas.

Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

_____. 2009. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

_____. 2009. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.* Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

_____. 2011. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

_____. 2011. *Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

_____. 2012. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

_____. 2013. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

_____. 2014. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

_____. 2014. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

_____. 2016. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

_____. 2017. *Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

_____. 2018*. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BUKU 1 *SPECIFY NEEDS* SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS)
MODUL KESEHATAN DAN PERUMAHAN 2019